

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Keaslian Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	26
F. Cara Penelitian	28
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Tinjauan Tentang Hukum Angkutan Udara Niaga	40
B. Tinjauan Tentang Aturan Hukum Pengadaan Pesawat Udara ...	47
1. Subyek Hukum Pengoperasian Pesawat Udara	47
2. Pengadaan Dan Impor Pesawat Udara	49
a. Melalui Perjanjian Jual Beli Pesawat Udara (<i>Aircraft Sale and Purchase Agreement</i>)	49
b. Melalui Perjanjian Sewa Beli (<i>Finance Lease</i>) ...	51
c. Melalui Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Operating Lease</i>)	52
3. Registrasi Pesawat Udara	53
C. Tinjauan Tentang Kontrak Dan Perjanjian Internasional	55
D. Tinjauan Tentang <i>Cape Town Convention 2001</i>	59
E. Tinjauan Tentang Perjanjian Penjaminan Pesawat Udara.....	61
1. Asas-Asas Dalam Perjanjian	62
2. Perjanjian Penjaminan Secara Umum	70
3. IDERA Sebagai Instrumen Hukum Pada Perjanjian Penjaminan Pesawat Udara	74
F. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa	78
G. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	81
1. Supremasi Hukum (<i>Supremacy of law</i>)	83
2. Persamaan di Depan Hukum (<i>Equality before the law</i>)	85
3. Penegakan Hukum (<i>Due process of law</i>)	86
BAB III	
LANDASAN TEORI	89
A. Teori Keadilan	89
B. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	92
C. Teori Kewenangan dan Efektifitas Hukum	94
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	97
A. Penyebab Lemahnya Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan Pada Proses	

Komersial	97
1. Jaminan Internasional Atas Pesawat Udara Menurut <i>Cape Town Convention 2001</i>	107
a. IDERA Sebagai Instrumen Hukum Yang Menjamin Kepentingan Kreditur	117
b. Klausul IDERA Pada Perjanjian <i>Leasing</i> Sebagai Jaminan Internasional	125
c. Peranan Otoritas Penerbangan Terhadap Jaminan Internasional Atas Pesawat Udara	139
2. Mekanisme Pengadaan Pesawat Udara	143
a. Transaksi Pengadaan Pesawat Udara	145
b. Perijinan Impor Pesawat Udara	148
c. Fasilitas Perpajakan Impor Pesawat Udara	151
3. Sengketa Jaminan Internasional Atas Pesawat Udara	164
a. Lembaga Penyelesaian Sengketa Jaminan Internasional	165
b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Jaminan Internasional	170
1. Mediasi	172
2. Putusan Badan Peradilan	181
4. Penerapan Prinsip Keadilan Pada Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Internasional	187
a. Penerapan Hukum dan Prinsip Keadilan Pada Perselisihan Debitur dan Kreditur	191
b. Prinsip Keadilan Menurut John Rawls	200
c. Lemahnya Penerapan Prinsip Keadilan Pada Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan internasional Atas Pesawat Udara	204
5. Faktor Penyebab Lemahnya Penerapan Prinsip Keadilan Pada Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Internasional	212
a. <i>Cape Town Convention 2001</i> Hanya Melindungi Kreditur	215
b. Tidak Adanya Norma Hukum Yang Memberikan Kewenangan Pada DJPU Untuk Menyelenggarakan Mediasi	218
c. Penetapan Tindakan Sementara Pengadilan Tidak Dapat Dieksekusi	234
B. Dampak Lemahnya Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan Pada Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Internasional dan Akibatnya Terhadap Keberlangsungan Industri Penerbangan Di Indonesia	251
1. Persepsi Pelaku Industri Penerbangan Indonesia Terhadap Penyelesaian Sengketa Jaminan Internasional	253
a. Pelindungan Hukum Investasi	255
b. Kepastian Hukum Investasi	260
2. Dampak Ekonomi Akibat Lemahnya Penerapan Prinsip Keadilan Pada Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Internasional Atas Pesawat Udara Terhadap Industri Penerbangan	263
C. Upaya Menjaga Keseimbangan Kepentingan Kreditur dan Debitur Guna Mendukung Terselenggaranya Prinsip Keadilan Pada Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Internasional	281
1. Politik Hukum Penyelenggaraan Transportasi Udara	283
a. Implementasi Perjanjian Internasional	286

b. Pengembangan Hukum Jaminan Pesawat Udara	294
c. Penyelesaian Sengketa Jaminan Internasional	297
2. Urgensi Regulasi Pada Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Internasional Atas Pesawat Udara	302
a. Implementasi <i>Cape Town Convention 2001</i> di Beberapa Negara	320
b. Penguatan Peran DJPU Sebagai Mediator Dan Pelaksanaan Eksekusi Pesawat Udara Pada Jaminan Internasional	324
c. Kebijakan Legislasi Pelindungan Hukum Terhadap Kreditur dan Debitur Yang Beritikad Baik	337
1. Pelindungan Terhadap Kreditur	343
2. Pelindungan Terhadap Debitur	347
d. Penguatan Koordinasi Antar Kementerian dan Penyelesaian Kewajiban Perpajakan Atas Re-Ekspor Pesawat Udara ...	357
3. Konsep Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Internasional Agar Mendukung Terselenggaranya Prinsip Keadilan	368
a. Pengajuan Permohonan IDERA	368
b. De-registrasi Pesawat Udara	374
c. Penguasaan Fisik Pesawat Udara	379
d. Re-ekspor Pesawat Udara	383
 BAB V	
PENUTUP	388
A. Kesimpulan	388
B. Saran	393
DAFTAR PUSTAKA	395